PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 127 TAHUN 2022
TENTANG
KELEMBAGAAN DAN TATA KELOLA PENYELESAIAN KETIDAKSESUAIAN TATA RUANG, KAWASAN HUTAN, IZIN, KONSESI, HAK ATAS TANAH DAN/ATAU HAK PENGELOLAAN

A. DAFTAR DATA PEMBENTUK PITTI

NO.	NAMA DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Informasi Geospasial Dasar (Garis Pantai) skala 1:50.000	Badan Informasi Geospasial
2.	Peta Batas Laut Negara skala 1:1.000.000	Kementerian Luar Negeri
3.	Peta Batas Darat Negara skala 1:25.000	Kementerian Luar Negeri
4.	Peta Batas Wilayah Administrasi Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Laut Provinsi skala 1:250.000 – 1:25.000	Kementerian Dalam Negeri
5.	Peta Batas Administrasi Provinsi, Peta Batas Administrasi Kabupaten/Kota skala 1:50.000	Kementerian Dalam Negeri
6.	Peta Batas Administrasi Desa/Kelurahan skala 1:10.000	Kementerian Dalam Negeri
7.	Peta Kawasan Hutan skala 1:250.000	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
8.	Peta Penetapan Kawasan Hutan skala 1:100.000 – 1:50.000	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
9.	Peta Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus minimal pada skala 1:50.000	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
10.	Peta Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan (IUPHHK-HA, IUPHHK-HT dan IUPHHK-RE) atau Perizinan Berusaha Terkait Pemanfaatan Kawasan Hutan minimal pada skala 1:50.000	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

11. Peta . . .

NO.	NAMA DATA	PENANGGUNG JAWAB
11.	Peta Perhutanan Sosial (Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan) minimal pada skala 1:50.000	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
12.	Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan skala 1:250.000	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
13.	Peta RTRW Provinsi skala 1: 250.000	- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional - Kementerian Kelautan dan Perikanan
14.	Peta RTRW Kabupaten skala 1:50.000 dan RTRW Kota skala 1:25.000	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
15.	Peta Hak Guna Usaha (HGU) minimal pada skala 1:50.000	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
16.	Peta Hak Pengelolaan (HPL) minimal pada skala 1:50.000	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
17.	Peta Hak Guna Bangunan (HGB) minimal pada skala 1:50.000	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
18.	Peta Penguasaan dan Kepemilikan Tanah (Hak Milik) skala 1:5.000	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
19.	Peta Hak Pakai skala 1:5.000	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
20.	Peta Hak Ulayat minimal skala 1:50.000	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
21.	Peta Lahan Sawah yang Dilindungi skala 1:5.000	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

22. Peta . . .

NO.	NAMA DATA	PENANGGUNG JAWAB
22.	Peta Rencana Tata Ruang Laut skala 1:1.000.000	Kementerian Kelautan dan Perikanan
23.	Peta Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah minimal pada skala 1:500.000	Kementerian Kelautan dan Perikanan
24.	Peta RZWP3K Provinsi skala 1:250.000	Kementerian Kelautan dan Perikanan
25.	Peta Sebaran Pulau-Pulau Kecil Terluar skala 1:50.000	Kementerian Kelautan dan Perikanan
26.	Peta Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu skala 1:50.000	Kementerian Kelautan dan Perikanan
27.	Peta Wilayah Adat di Perairan Laut skala 1:50.000	Kementerian Kelautan dan Perikanan
28.	Peta Izin Lokasi/Perizinan Berusaha Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut skala 1:50.000	Kementerian Kelautan dan Perikanan
29.	Peta Izin Lokasi/Perizinan Berusaha di Laut dan Peta Perizinan terkait Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Laut skala 1:50.000	Kementerian Kelautan dan Perikanan
30.	Peta Izin Usaha/Peta Perizinan Berusaha Sektor Pertambangan skala 1:50.000	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
31.	Peta Wilayah Kerja Migas skala 1:50.000	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
32.	Peta Persebaran Lokasi Transmigrasi skala 1:50.000	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
33.	Peta Persebaran Kawasan Transmigrasi skala 1:50.000	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
34.	Peta Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) minimal pada skala 1:50.000	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

35. Peta . . .

NO.	NAMA DATA	PENANGGUNG JAWAB
35.	Peta Kawasan Industri Eksisting dan Peta Rencana Kawasan Industri skala 1: 50.000	Kementerian Perindustrian
36.	Peta Tutupan Kelapa Sawit Indonesia skala 1:50.000	Kementerian Pertanian
37.	Peta Izin Usaha/Peta Perizinan Berusaha Sektor Perkebunan skala 1:50.000	Kementerian Pertanian

B. DAFTAR DATA PENDUKUNG LAINNYA

NO.	NAMA DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Peta Penutup Lahan skala 1:50.000	Badan Informasi Geospasial
2.	Peta Pelepasan Kawasan Hutan skala 1:50.000	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.	Peta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)/Peta Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) skala 1:50.000	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4.	Peta Tata Batas Area Kerja Izin Pemanfaatan Hutan (IUPHHK-HA/HT/RE)/ Peta Penetapan Batas Areal Kerja Perizinan Berusaha Terkait Pemanfaatan Hutan skala 1:50.000	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5.	Peta Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) minimal pada skala 1:50.000	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6.	Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional skala 1:1.000.000	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
7.	Peta Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan skala 1:500.000	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

8. Peta . . .

NO.	NAMA DATA	PENANGGUNG JAWAB
8.	Peta Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional skala 1: 50.000 dan 1: 25.000	- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional - Kementerian Kelautan dan Perikanan
9.	Peta Izin Lokasi dan Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang minimal pada skala 1:50.000	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
10.	Peta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) skala 1:5.000	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
11.	Peta Proyek Strategis Nasional (PSN) skala 1:50.000	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

Lydia Silvanna Djaman